



LENCAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH PAPUA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2021



REFORMASI
HUKUM

icare



learning
KEMENKUMHAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2021 ini telah tersusun. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua beserta jajaran Unit Pelaksana Teknisnya tahun 2021 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kepala Kantor Wilayah yang kemudian diturunkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua



dengan para Kepala Divisi. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Laporan Kinerja merupakan amanah dari pemerintah kepada lembaga penyelenggara Negara yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2021 ini adalah:

1. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja Kepala Kantor Wilayah kepada Menteri Hukum dan HAM dan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja para Kepala Satuan Kerja kepada Kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
3. Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
4. Tersusunnya laporan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan menengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, disisi lain akan menjadi akselerasi dalam hal aktual dan akurasi.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemangku jabatan dan pelaksana tugas seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua atas subangsih dan kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM diwilayah Papua untuk mencapai visi dan misinya dengan selalu memegang teguh nilai Kami PASTI Tifa (Transformasi, Improvmen, Fisibilitas dan Aktualisasi).

Jayapura, 16 Februari 2022

Kepala Kantor Wilayah,

Anthonium M. Ayorbaba, SH., M.Si
NIP. 19710515 199610 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Pengertian	2
E. Sistematika Penulisan	3
F. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	4
1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	4
2. Struktur Organisasi	6
3. Kondisi Satuan Kerja dan Sumber Daya Manusia	7
4. Capaian dan Masalah Yang DiHadapi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Misi, Sasaran dan Program Kantor Wilayah	12
1. Visi, Misi dan Tata Nilai	12
2. Sasaran	13
3. Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	13
B. Perjanjian Kinerja	15
1. Divisi Administrasi	15
2. Divisi Masyarakat	16
3. Divisi Keimigrasian	16
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Divisi Administrasi	20
2. Divisi Masyarakat	21
3. Divisi Keimigrasian	22
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	22
B. Akuntabilitas Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu asas dalam penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara pemerintah menetapkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan kini menjadi Laporan Kinerja.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2019 dibuat sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mana menyajikan pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024)

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Pengertian

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja yang merupakan laporan hasil kinerja setiap unit kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wajib disusun oleh setiap pimpinan unit kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada setiap akhir tahun anggaran.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan tujuan
 - C. Dasar Hukum
 - D. Pengertian
 - E. Sistematika Penulisan
 - F. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
 - G. Capaian dan Masalah
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
- A. Visi Misi
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - C. Perjanjian Kinerja
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
- A. Akuntabilitas Kinerja
 - B. Akuntabilitas Anggaran
- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

- LAMPIRAN : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

F. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala,
- (3) Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Pasal 2

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

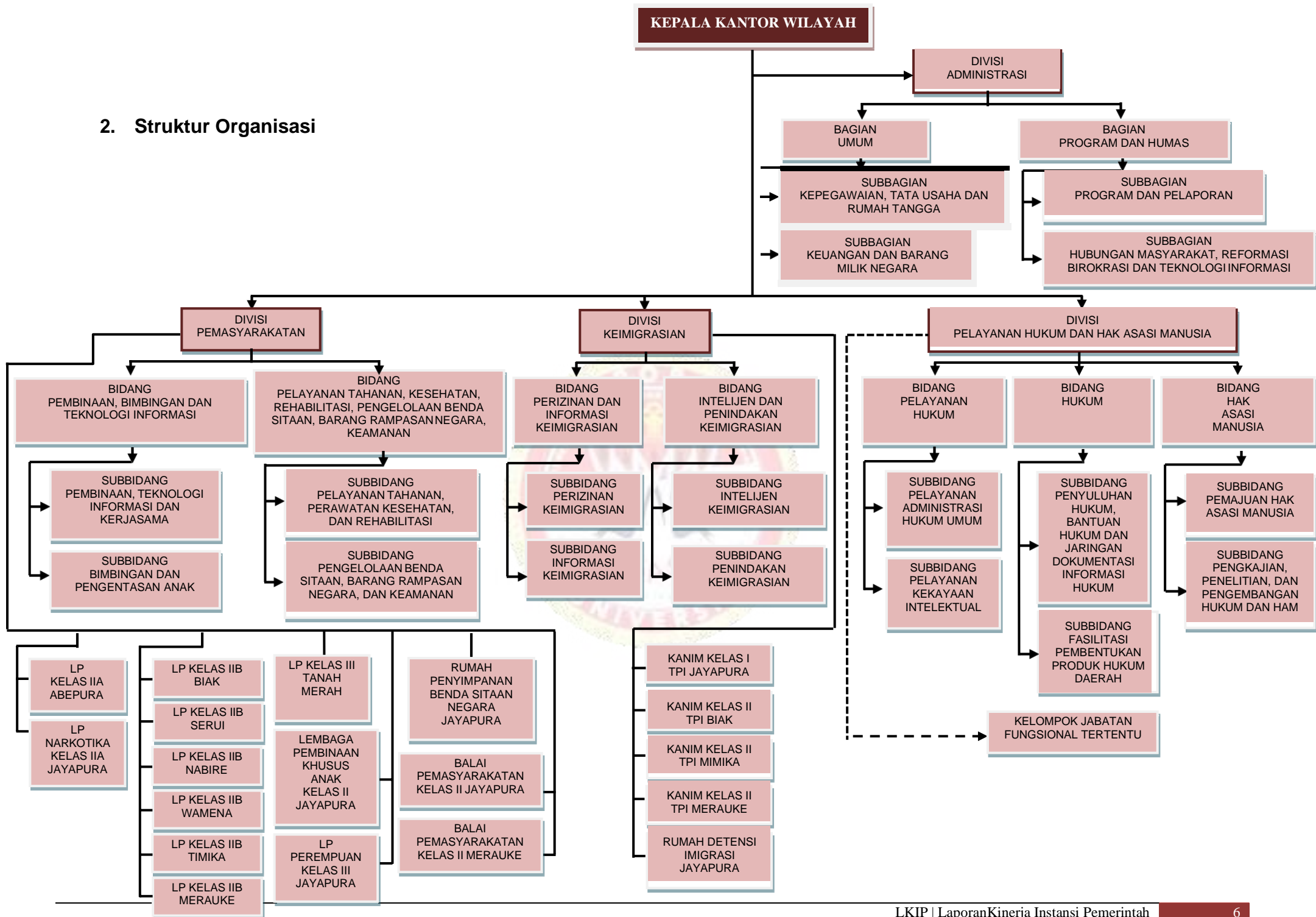
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

- (2) Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- (3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis dilingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- (5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, penegakan hak asasi manusia; dan
- (6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



2. Struktur Organisasi



3. Kondisi Satuan Kerja dan Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tercermin dari:

- (1) Divisi Administrasi
- (2) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (3) Divisi Pemasyarakatan yang membawahi 14 (empat belas) Unit Pelayanan Teknis yaitu:
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura
 - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah
 - Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura
 - Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
 - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jayapura
 - Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura
 - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura
- (4) Divisi Keimigrasian yang membawahi 5 (lima) Unit Pelayanan Teknis yaitu:
 - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura
 - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak
 - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika
 - Kantor Imigrasi kelas II TPI Merauke
 - Rumah Detensi Imigrasi Jayapura

**REKAPITULASI PEGAWAI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
TAHUN 2021**

No.	SATUAN KERJA	PNS			CPNS		
		L	P	TTL	L	P	TTL
1.	Kantor Wilayah	90	49	135	1	1	2
2.	LP Kelas IIA Abepura	76	23	99	0	0	0
3.	LP Kelas Narkotika Kelas IIA Jayapura	82	16	98	0	0	0
4.	LP Kelas IIB Biak	45	9	54	0	0	0
5.	LP Kelas IIB Serui	37	7	44	0	0	0
6.	LP Kelas IIB Nabire	49	8	57	0	0	0
7.	LP Kelas IIB Wamena	51	9	60	0	0	0
8.	LP Kelas IIB Timika	46	8	54	0	0	0
9.	LP Kelas IIB Merauke	58	7	65	0	0	0
10.	LP Kelas III Tanah Merah	24	6	30	0	0	0
11.	Bapas Kelas II Jayapura	19	12	31	0	0	0
12.	Bapas Kelas II Merauke	11	4	15	0	0	0
13.	Rupbasan Kelas I Jayapura	13	8	21	0	0	0
14.	LPP Kelas III Jayapura	21	30	51	0	0	0
15.	LPKA Kelas II Jayapura	35	15	50	0	0	0
16.	Kanim Kelas I TPI Jayapura	112	28	140	0	0	0
17.	Kanim Kelas II TPI Biak	30	8	38	0	0	0
18.	Kanim Kelas II TPI Mimika	29	14	43	0	0	0
19.	Kanim Kelas II TPI Merauke	47	5	52	0	0	0
20.	Rudenim Jayapura	25	16	41	0	0	0
TOTAL		900	282	1178	1	1	2

4. Capaian dan Masalah Yang Dihadapi

Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki melaksanakan kegiatan beberapa kendala/masalah, yaitu:

PENCAPAIAN	BELUM TERCAPAI DAN PERMASALAHAN
KEPALA KANTOR WILAYAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 2. Tercapainya pelaporan LHKASN 95,18% dan LHKPN 50%; 3. Menyediakan sarana dan prasarana guna pencegahan dan pengendalian Covid-19; 4. Tersedianya sarpras dalam meningkatkan pelayanan public yang telah berstandar protocol kesehatan; 5. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk memberikan dukungan/fasilitasi terkait proyek Perubahan PIM I dan juga mensosialisasikan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat; 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan protocol Kesehatan pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis; 7. Melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di jajaran UPT Pemasarakatan; 8. Melaksanakan pengamanan dalam menjaga stabilitas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT); 9. Bekerja Sama dengan OBH Provinsi Papua dalam rangka pelatihan Para Legal; 10. Meningkatkan tingkat maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan interval skor 3 menuju 4; 11. Sinergitas bersama Balai Diklat Pelatihan Masyarakat untuk meningkatkan SDM Pegawai pada UPT Pemasarakatan; 12. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19; 13. Melaksanakan koordinasi UPT dengan Kantor Wilayah dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan Corona Virus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya pengisian LHKASN sebesar 100% di karenakan ada beberapa pegawai yang meninggal dunia atau di pecat.

14. Disease 2019;

DIVISI ADMINISTRASI

1. Terlaksananya Penerimaan CPNS, Poltekip dan Poltekim yang bebas dari KKN;
2. Penguatan dan pendampingan Reformasi Birokrasi;
3. Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2022;
4. Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Informasi Publik;
5. Terlaksananya Refleksi Akhir Tahun 2021;
6. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.
7. Telah melaksanaskan koordinasi dengan BKN;
8. Telah melaksanakan koordiansi eksternal dengan Angkatan Laut, kepolisian maupun pihak Rumah Sakit terkait penerimaan CPNS;
9. Telah melaksanakan koordinasi eksternal dengan insan pers Jayapura terkait peningkatan kualitas maupun kecepatan dalam pemberitaan baik di media lokal maupun media sosial;
10. Penyerapan anggaran program dukungan manajemen sebesar 97,05%

DIVISI PEMASYARAKATAN

1. Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis TI yang transparan, efektif, efisien pada UPT Rupbasan;
2. Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi;
3. Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat;
4. Terlaksananya fungsi Pokmas;
5. Seluruh Lapas melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait;
6. Seluruh Lapas telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban;

7. Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan /anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security;
8. Meningkatkan validitas dan akurasi data keamanan;
9. Lapas bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal);
10. Terlaksananya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Lapas dan Bapas Pilot Project.

DIVISI KEIMIGRASIAN

1. Sosialisasi Layanan Eazy Paspor ke Instansi Pemerintah dan Swasta/BUMN, Komunitas, Sekolah dan Perumahan;
2. Pelaksanaan pelayanan Eazy Paspor;
3. Terlaksananya Rapat Timpora Tingkat Provisi;
4. Terlaksananya Operasi Gabungan Timpora Tingkat Provinsi dan UPT Imigrasi.
5. Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Kodam XVII Cenderawasih dalam Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan RI-PNG.
6. Terlaksananya Penegakkan Hukum (Gakkum) Keimigrasian di Wilayah Papua.
7. Penyerapan anggaran sebesar 89,14% dengan nilai SMART 94.46.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran UMKM menjadi Perusahaan Perseorangan sebanyak 6 UMKM. 2. Pelaporan BO sebanyak 28,08 % dari total 5.959 Korporasi di wilayah. 3. Pendaftaran Cipta sebanyak 184, Merek sebanyak 49, Paten sebanyak 1 dan KIK sebanyak 95. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemi Covid-19. 2. Beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi yang ada di Divisi Yankum kosong. 3. SDM, Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di divisi Yankum yang kurang memadai. 4. Kurangnya respon atau |
|--|--|

4. Penandatanganan MoU dengan Universitas Cenderawasih.
 5. Pengharmonisasian 71 Raperda.
 6. Penandatanganan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Tugas dan Fungsi yang ada di Divisi Yankum sebanyak 6 MoU.
 7. Pelatihan Para Legal yang menghasilkan 60 orang Para Legal.
 8. Verifikasi 6 OBH baru.
 9. Terintegrasinya 16 Website Pemerintah Daerah ke JDIHN
 10. UPT Kanim Merauke mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
 11. Pelaksanaan kajian HAM dengan judul "Dampak Pandemi Terhadap Kebangkitan Ekonomi Nasional di Provinsi Papua Khususnya pada Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke"
- dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Tusi di Divisi Yankum.
5. Jaringan Internet yang masih belum dapat menjangkau ke beberapa Kabupaten/Kota pemekaran (pedalaman).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi, Sasaran dan Program Kantor Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, dijelaskan bahwa Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat pencabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019.

1. Visi, Misi dan Tata Nilai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merupakan salah satu dari 34 instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah juga melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Visi Kementerian Hukum dan HAM RI adalah **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**, sedangkan misi Kementerian Hukum dan HAM RI adalah:

- Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai dengan menyusun kebijakan , program serta

kegiatan. Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka fokus pengeralahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran tersebut adalah:

- Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol (dilkumjakpol) baik ditingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota;
- Berkurangnya pelanggaran hukum dibidang keimigrasian dan HKI;
- Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM);
- Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua

Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan alokasi Pagu sebesar **Rp. 166.830.533.000** yang naik sebesar **Rp. 29.153.312.000 (82%)** dari total Pagu Tahun 2020 sebesar **Rp. 137.677.221.000** dikarenakan adanya belanja modal (pembangunan) pada tahun 2021, dilain sisi adanya kenaikan pada beberapa satker khususnya UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan SDM (CPNS) dengan rincian sebagai berikut:



B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun 2021 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta yang kemudian diuraikan kembali dan dibuat menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi serta Antara Kepala Divisi dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis. (**Lampiran 1**)

Berikut perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan Kepala Divisi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

1. Divisi Administrasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82	16.030.996.000
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88	

2. Divisi Pemasyarakatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	1.538.280.000
		1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%	
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%	
		3. Persentase menurunnya	1%	

		residivis		
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%	
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	70	

3. Divisi Keimigrasian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	1.500.801.000
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	1.825.600.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	601.640.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1	275.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	376.670.000
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	643.239.000
		2. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	

		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%	234.768.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dengan kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan menggunakan indikator keberhasilan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada akhir tahun 2021.

Adapun rumus dalam capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2021}}{\text{Target Capaian Tahun 2021}} \times 100\% = \dots$$

1. Divisi Administrasi

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2021					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	82	82	100%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88	88	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Papua khususnya Divisi Administrasi melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang terwujudnya manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 2. Penyusunan Pagu Indikatif, Anggaran dan alokasi Tahun 2022 3. Pelaksanaan penerimaan CPNS, Poltekop dan Poltekim 4. Koordinasi dan Sinergitas eksternal maupun internal 5. Pengisian LHKASN dan LHKPN 			

		<p>6. Penguatan dan pendampingan RB dalam pembentukan 8 area perubahan dan zona integritas serta WBK/WBBM</p> <p>7. Menggunakan SISUMAKER sebagai media pengirim surat internal Kemenkumham</p> <p>8. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2021</p> <p>9. Melakukan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan memberikan vitamin untuk menjaga kesehatan pegawai dan senam kebugaran</p>
--	--	---

2. Divisi Pemasyarakatan

CAPAIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2021					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	3,15	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum dengan peningkatan program berbasis teknologi informasi			
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%	40%	100%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%	60%	100%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%	1%	100%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%	70%	100%

	Analisa Capaian Kinerja :	Berkoordinasi dan bersinegritas serta bekerja sama dengan instansi lain dalam meningkatkan kemampuan kemandirian WBP, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan barang sitaan dilakukan pemeriksaan secara rutin.			
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	70	70	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan penggunaan aplikasi Siap Ladani dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk program Bela Negara kepada WBP			
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaratan yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75	75	100%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	75	75	100%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT	75	75	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Penggunaan aplikasi siap ladani dan bekerja sama dengan Pemda serta stackholder terkait program - program untuk WBP			
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasaratan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	49	100%
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87.5	87.5	100%
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat	40	40	100%
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	60	100%
		5. Indeks Pengelolaan Khusus Anak	60	60	100%
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60	60	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan WBP Khusus anak dengan proses belajar mengajar kejar program paket, pembinaan kegiatan olahraga keterampilan, pelatihan dasar kepemimpinan, bela negara dan terapi			
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang aman dan tertib	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	70	70	100%
		Analisa Capaian Kinerja :	Pemeriksaan secara rutin untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di UPT		

7	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80	80	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatnya penyelenggaraan Masyarakat sudah tercapai dengan dilakukannya pemberian program2 layanan kepada WBP dan Keluarga.			
8	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	100%
		2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	100%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Tingkatkan Pengaktifan aplikasi Siap Ladani pada seluruh Unit Pelaksana Teknis			
9.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	60%	100%
		2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	40%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Berkoordinasi dan sinergitas dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Kehutanan), pemeliharaan dilakukan secara rutin dan pengeluaran/penerimaan sesuai SOP.			
10	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	100%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	97%	100%

		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	75%	100%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	13%	100%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	25%	100%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	62%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi bekerja sama dengan instansi terkait			
11	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	40%	100%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	50%	100%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	25%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM Klien Anak terkait pendidikan dan keterlampiran			
12	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	70%	100%
		2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%

		3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	70%	100%
		4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	70%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM Anak dengan program kerja paket, keterampilan pengelasan, pelatihan dasar - dasar kepemimpinan, Kepramukaan terkait Bela Negara dan juga pendidikan kerohanian.			
13	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan program deteksi dini dan program Satopspatnal serta peningkatan penerapan aplikasi Siap Ladani.			
14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%

		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	100%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan kualitas bahan makanan warna binaan, penyediaan sumber air bersih, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan ketersediaan obat - obatan dan pemeriksaan urin secara berkala untuk deteksi dini dan bimbingan kerohaniawan serta psikologis.			

3. Divisi Keimigrasian

CAPAIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2021					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	26	806%
	Analisa Capaian Kinerja :	Peningkatan Kepuasan Masyarakat telah melebihi target			
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,15	26	806%
	Analisa Capaian Kinerja :	Terlaksananya Rapat Timpora Tingkat Provinsi; Terlaksananya Operasi Gabungan Timpora Tingkat Provinsi dan UPT Imigrasi. Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Kodam XVII Cenderawasih dalam Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan RI-PNG. Terlaksananya Penegakkan Hukum (Gakkum) Keimigrasian di Wilayah Papua.			
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15	26	806%
	Analisa Capaian Kinerja :	Meningkatkan dengan Layanan Eazy Paspor ke instansi pemerintah dan swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan			
4	Meningkatkan Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	26	806%
	Analisa Capaian Kinerja :	Terlaksananya Rapat Timpora Tingkat Provinsi; Terlaksananya Operasi Gabungan Timpora Tingkat Provinsi dan UPT Imigrasi. Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Kodam XVII Cenderawasih dalam Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan			

5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	26	806%
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	26	806%
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	26	806%
Analisa Capaian Kinerja :		Terlaksananya Sosialisasi Layanan Eazy Paspor, Rapat Timpora tingkat provinsi, dan penegakan hukum			

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2021					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan		
	Analisa Capaian Kinerja:	Dalam tahap perencanaan			
2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	78%	101%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	79%	100%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76%	76%	100%

		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%
		5. Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	100%
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksananya bantuan hukum litigasi yang berhasil di cairkan LBH Justice Peace dan PBH Cenderawasih berjumlah 38, terlaksananya bantuan hukum non litigasi yang berhasil di cairkan LBH Justice Peace dan PBH Cenderawasih berjumlah 43 dan terlaksananya partisipasi anggota JDHI wilayah papua.			
3	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1	3,1	100%
	Analisa Capaian Kinerja:	Meningkatkan kualitas peraturan perundang - undangan yang sesuai asas			
4	Terbentuknya peraturan perundang - undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang - undang yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	10	13%
2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang - undangan		20			
3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang - undangan yang diselesaikan sesuai		80	10	13%	

		dengan permohonan			
	Analisa Capaian Kinerja:	Telah dilakukan koordinasi dengan Pemda			
5	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	10	13%
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksananya tahap koordinasi dengan Pemda			
6	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	14 Orang		
	Analisa Capaian Kinerja:	Dalam tahap perencanaan dan akan dilaksanakan sesuai kalender kerja			
7	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3.15	100%
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksana dengan baik untuk pelayanan publik di bidang hukum			
8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%		
	Analisa Capaian Kinerja:	Masih tahap koordinasi ke pusat			
9	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	65%	100%

		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten /Kota memenuhi HAM.	35%	35%	100%
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksananya kegiatan aksi HAM pada bulan maret			
10	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Presentase Kab/Kota peduli HAM	15%		
		2. Presentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang tidaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3%	3%	100%
		3. Presentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	52	70%
	Analisa Capaian Kinerja:	Kegiatan kabupaten kota peduli HAM di tiadakan berdasarkan Surat Dirjen HAM, terlaksananya penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada bulan april dan telah terlaksana instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM			
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	3	150%
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah		
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik	1 Instansi Pemerintah		

		berbasis HAM			
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksananya 3 instansi yang melaporkan aksi HAM yaitu Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom dan Kab. Mamberamo Tengah dan Kegiatan kabupaten kota peduli HAM di tiadakan berdasarkan Surat Dirjen HAM			
12.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	1	33%
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksana 1 rekomendasi yang telah diterima oleh Bidang HAM Kanwil			
13	Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	1. Presentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kemenkumham	70%	18	25,7%
		2. Presentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal BALITBANGKUMHAM	20%		
	Analisa Capaian Kinerja:	Terlaksana 18 rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kemenkumham dan masih dalam tahap koordinasi dengan pusat			
14	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	150	214%

		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1	100%
15	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	2	58%
	Analisa Capaian Kinerja :	Penerbitan SKT Parpol			
16	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	1. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%	42	49%
	Analisa Capaian Kinerja :	Pelantikan notaris pengganti dan pelantikan PPNS			
17	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	2	40%
	Analisa capaian kinerja :	Diseminasi Layanan Ahu di Kab. Biak			
18	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	40	49%
	Analisa capaian kinerja :	Permohonan pengaduan masyarakat			

19	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.3	2	60%
	Analisa Capaian Kinerja :	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum telah ditingkatkan			
20	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual	3.3	2	60%
	Analisa capaian kinerja :	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual dengan gencar mensosialisasikan			
21	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	2 Layanan	130	6500%
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4	400%
	Analisa capaian kinerja :	Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan pendaftaran merek dan hak cipta			
22	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	1	4%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	3	300%
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1	100%

	Analisa capaian kinerja :	Terlaksananya pengaduan pelanggaran terkait masalah merek, kegiatan kerjasama pengawasan potensi pelanggaran KI, terlaksananya edukasi/himbauan tentang pencegahan pelanggaran KI dan Pemantauan produk IG di Kab. Merauke
--	---------------------------	--

Total Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2021 adalah 94.01 %

B. Akuntabilitas Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran Keseluruhan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua akhir Tahun 2021 adalah 83,23% dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA TAHUN 2020			
SATUAN KERJA	DIPA	REALISASI	
		Rp.	%
DUKMAN	16.030.996.000	15.558.048.213	97,05
AHU	1.825.600.000	1.578.315.484	86,45
KI	601.640.000	564.661.589	93,85
PP	275.000.000	267.725.100	97,35
HAM	376.670.000	370.345.000	98,32
BPHN	643.239.000	565.840.655	87,97
BALITBANGHAM	234.768.000	227.959.000	97,10
DITJEN PEMASYARAKATAN			
Divisi Pemasyarakatan	1.538.280.000	1.506.135.798	97,91
LP Kelas IIA Abepura	12.763.677.000	12.748.058.808	99,88
LP Kelas Narkotika IIA Jayapura	11.959.437.000	11.471.331.681	95,92
LP Kelas IIB Biak	6.324.107.000	6.295.188.188	99,54
LP Kelas IIB Serui	5.201.441.000	5.177.951.881	99,55
LP Kelas IIB Nabire	6.869.626.000	6.856.215.830	99,80
LP Kelas IIB Wamena	5.418.195.000	5.325.949.867	98,30

LP Kelas IIB Timika	6.886.043.000	6.352.135.838	92,25
LP Kelas IIB Merauke	8.621.638.000	8.573.251.929	99,44
LP Kelas III Tanah Merah	3.095.943.000	3.057.857.120	98,77
Bapas Kelas II Jayapura	3.149.696.000	3.041.124.315	96,55
Bapas Kelas II Merauke	1.853.049.000	1.810.414.170	97,70
Rupbasan Kelas I Jayapura	1.952.923.000	1.912.196.560	97,91
LPKA II Jayapura	3.931.252.000	3.607.187.843	91,76
LP Perempuan Kelas III Jayapura	3.852.766.000	3.836.224.779	99,57
DITJEN IMIGRASI			
Divisi Keimigrasian	1.500.801.000	1.337.783.077	89,14
Kanim Kelas I Jayapura	15.131.316.000	11.910.968.102	78,72
Kanim Kelas II Biak	24.737.703.000	6.220.110.965	25,14
Kanim Kelas II Mimika	7.790.192.000	6.422.925.868	82,45
Kanim Kelas II Merauke	8.512.949.000	6.923.190.380	81,33
Rudenim Jayapura	5.751.586.000	5.330.999.055	92,69
TOTAL	166.830.533.000	138.850.097.095	83,23

Analisa Capaian Akuntabilitas Anggaran

Total realisasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 138.850.097.095,-** atau 83,23% dari total PAGU akhir **Rp. 166.830.533.000,-**

Adanya belanja modal sarana prasana pada masing – masing Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki capaian kinerja **94.01%** dengan realisasi anggaran mencapai **83, 23 %**. pencapaian ini didukung dengan berbagai faktor yaitu:

1. Alokasi anggaran pada kegiatan yang berbasis pelayanan cukup memadai sehingga memberikan dampak baik pada masyarakat;
2. Adanya penambahan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mendukung kegiatan pelayanan seperti tenaga perancang peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum maupun pembimbing kemasyarakatan;
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah terfasilitasi oleh pemerintah dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2020 bagi Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis jajaran Pemasyarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Namun tidak dapat Kami kesampingkan adalah belum adanya dana yang diperuntukkan untuk tunjangan kemahalan bagi petugas dikabupaten tertentu di Papua yang memiliki biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena serta beberapa pos keimigrasian yang memiliki akses terbatas.

B. Saran

Untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM diwilayah, beberapa masukan Kami sampaikan yaitu:

1. Beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Papua yang bangunannya belum sesuai standar bangunan Lapas/Prototype bangunan Lapas, khususnya tembok pembatas, pembuatan ornames keliling, reposisi blok hunian yang saat ini menjadi salah satu area pelarian serta air bersih;

2. Alokasi dana bagi petugas imigrasi di pos lintas batas terpencil dan UPT yang memiliki biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Jayapura saat ini dirasakan sangat kurang;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas bahan makanan Narapidana/Tahanan di daerah rayon khusus Papua seperti LP Wamena, LP Timika, dan LP Tanah Merah untuk ditingkatkan mengingat tingkat kemahalan di daerah tersebut.
4. Seluruh Satuan Kerja harus memiliki cctv dan sistemnya terpusat di Kantor Wilayah;
5. Untuk WBP perempuan dan anak yang terdapat pada unit pelaksana teknis agar dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Keerom dan LPKA Kelas II Jayapura;
6. Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Pelayanan AHU berbasis online dan pembentukan OBH untuk mencukupi pelayanan hukum dan HAM di Papua serta kolaborasi eksternal di tingkatkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini dibuat sebagai bahan laporan dan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya bagi kemajuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.



Kepala Kantor Wilayah,

Antonius M. Ayorbaba, SH., M.Si
NIP. 19710515 199610 1 001